



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

Kasus Replanting, Jaksa Sudah Periksa 15 Saksi

KOTA MANNA - Kasus replanting kelapa sawit yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan masih berlanjut. Terbaru, jaksa telah memanggil 15 orang saksi untuk diminta keterangan. Salah satunya kepala dinas di jajaran Pemkab Bengkulu Selatan.

Hingga pertengahan tahun 2024 ini, jaksa Kejari Bengkulu Selatan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus replanting tahun 2023 itu. Kajari Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah, SH, MH melalui Kasi Pidsus Dafit Riadi, SH mengatakan pengusutan kasus berdasarkan laporan yang masuk ke kejaksaan tersebut ditangani secara profesional.

Dijelaskannya, laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi pada program replanting kelapa sawit di Bengkulu Selatan tahun 2023 itu, masih tahap penyelidikan oleh

jaksa. Dalam tahap penyelidikan ini beberapa orang saksi telah dipanggil atau diminta keterangan oleh jaksa penyidik.

"Saat ini masih dalam tahap penyelidikan," terang Dafit.

Dalam tahap penyelidikan itu ada beberapa orang yang telah diminta keterangan. Diungkapkan Dafit, pihak-pihak terkait tersebut mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelompok tani, hingga pihak ketiga dari program replanting tahun 2023.

"Pihak-pihak yang kita panggil sekitar 15 orang lebih kurang. Dari OPD ada, dari kelompok taninya ada. Termasuk dari pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan yang bekerjasama dengan kelompok tani," jelas Dafit.

Selain itu, ia pun tidak membantah bahwa pihaknya juga memanggil

kepala dinas terkait. "Dari OPD ada (kepala dinas)," ujar Dafit.

Berdasarkan keterangan jaksa sebelumnya, modus perkara ini, Poktan nekat melakukan kegiatan replanting kelapa sawit di lahan semak belukar. Padahal program replanting kelapa sawit khusus untuk peremajaan kelapa sawit yang sudah tua.

Untuk lokasi yang diduga terlibat dugaan kasus tersebut di salah satu desa di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas wilayah yang digarap oleh kelompok tani tersebut mencapai 50 hektare.

Terpisah, anggota DPRD Bengkulu Selatan, Wadimin mengatakan, penanganan kasus replanting tersebut hampir terjadi setiap tahun oleh aparat penegak hukum. Tahun 2024 ini kembali terjadi di Bengkulu Selatan.

Kondisi ini, menurut Wadimin, sangat memperhatikan bagi pemerintah daerah yang telah berusaha mengelola bantuan program pemerintah pusat tersebut.

Ia mengkhawatirkan persoalan ini membuat Bengkulu Selatan dicap sebagai kabupaten gagal dalam mengelola bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu Wadimin berharap aparat dapat menemukan dalang dugaan kasus replanting itu.

"Kita yakin kalau ini benar-benar terbukti ada indikasi korupsi, maka ada dalangnya yang memang sengaja mengambil keuntungan pribadi," ujar Wadimin.

Tidak ingin berkomentar banyak, Wadimin menyakini aparat kejaksaan dapat mengungkapkan kasus hingga tuntas, sehingga Bengkulu Selatan aman dari oknum-oknum yang memanfaatkan bantuan untuk kepentingan pribadi.

"Saya percaya itu perbuatan oknum maka tangkap oknumnya," harap Wadimin. (tek)